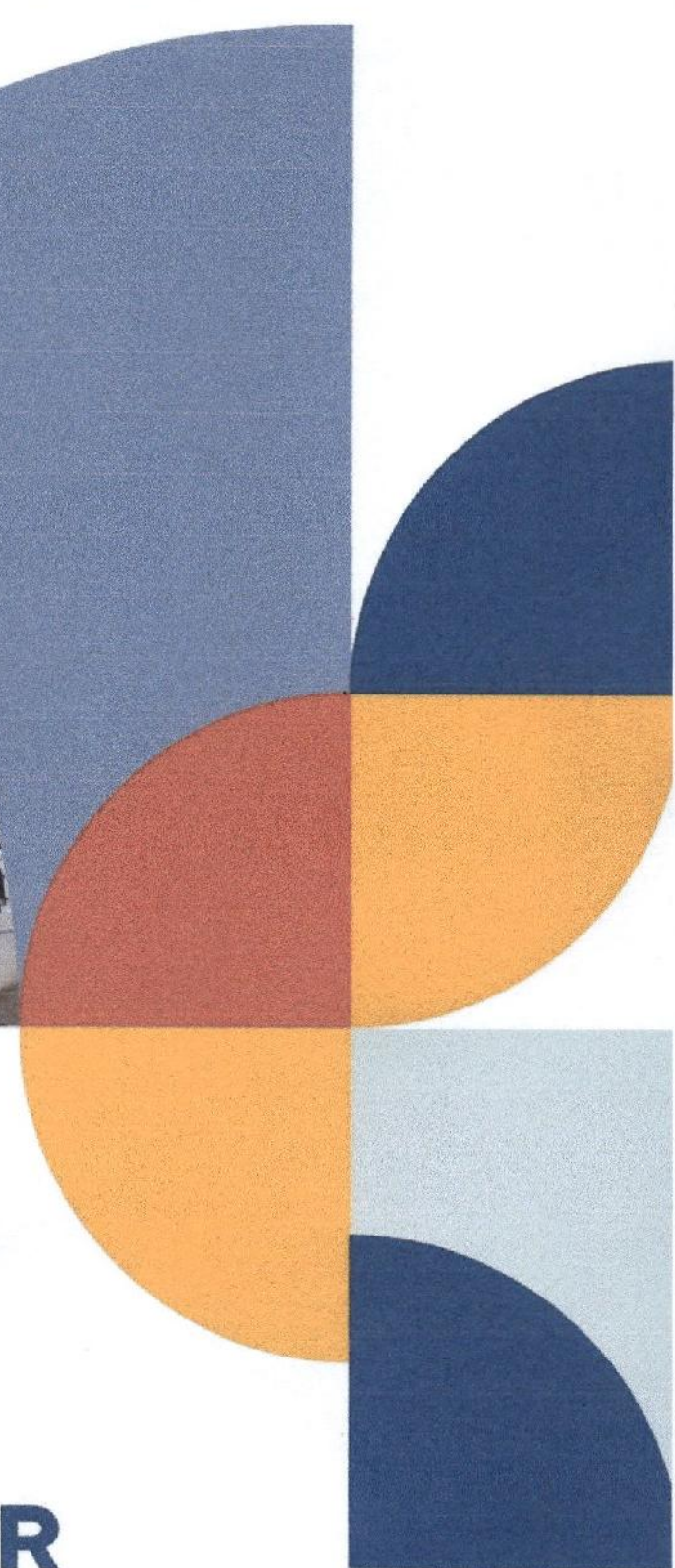




PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA



# LAPORAN BULANAN BULAN OKTOBER 2025

**#** bangga  
melayani  
bangsa

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Contact Us  
(021) 22859672

More Information  
[www.ptun-jakarta.go.id](http://www.ptun-jakarta.go.id)

Our Office  
Jl. A. Sentra Primer Baru Timur,  
Pulo Gebang, Jakarta Timur. 13950

## DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Dasar .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	1
C. Jenis Laporan .....	1
BAB II. PELAKSANAAN TUGAS .....	2
A. Kesekretariatan .....	2
B. Kepaniteraan .....	18
BAB III. TELAAHAN .....	29
BAB IV. KESIMPULAN, USUL DAN SARAN .....	30

# LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. DASAR

Peradilan Tata Usaha Negara ( PERATUN ) merupakan lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk, yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986, adapun tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 pada tanggal 14 Januari 1991, Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) resmi beroperasi, salah satunya adalah PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA yang berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dengan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.

#### B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Bulanan ini merupakan kumpulan dari masing – masing Sub Bagian sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan juga di maksud pula sebagai bahan informasi penyempurnaan tugas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

#### C. JENIS LAPORAN

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki Jenis Laporan meliputi bidang Kesekretariatan, bidang Kepaniteraan dan bidang lainnya sebagai berikut :

##### 1. Kesekretariatan :

- Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
- Sub Bagian Umum dan Keuangan
- Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

##### 2. Kepaniteraan :

- Kepaniteraan Perkara
- Kepaniteraan Hukum

# LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

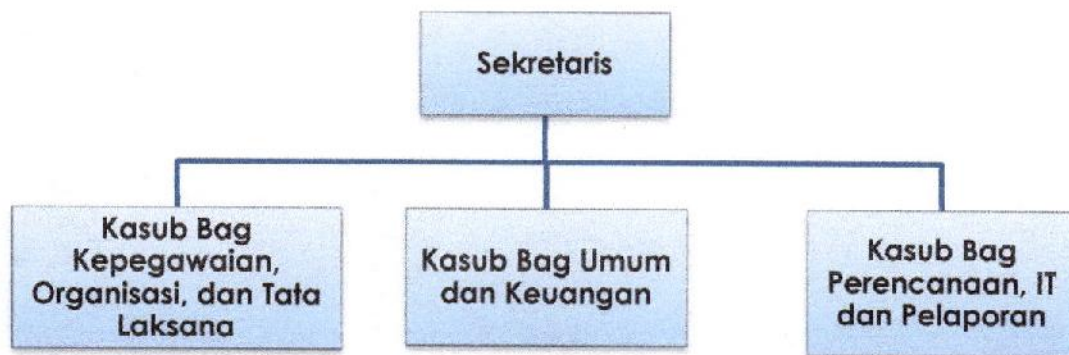
## BAB II

### PELAKSANAAN TUGAS

#### A. KESEKRETARIATAN

Kesekretariatan PTUN Jakarta adalah aparatur tata usaha negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, SDM dan Saprasi di lingkungan PTUN Jakarta.

Berikut ini adalah Struktur Organisasi Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta :



#### - SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

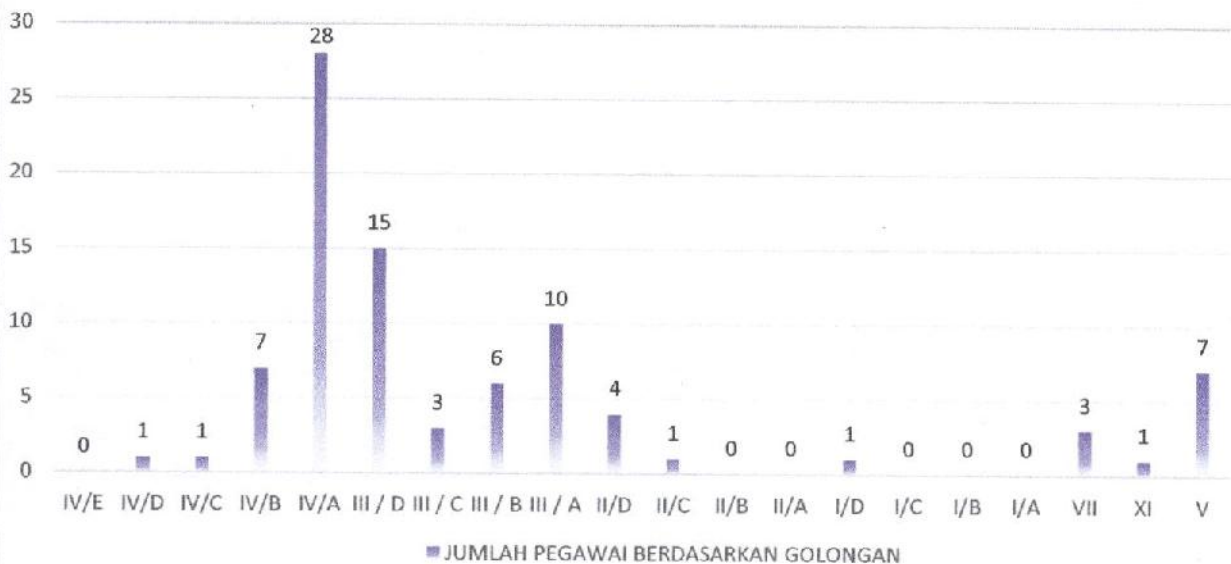
##### a. Jumlah Pegawai

Jumlah Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 31 Oktober 2025 adalah 73 Orang PNS, 4 orang CPNS, 11 Orang PPPK ( P3K ), yang terdiri dari Laki-laki yang berjumlah 59 orang dan Perempuan 29 Orang.

Adapun rinciannya sebagai berikut :

# LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

## JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN



## Mutasi

### Mutasi Kedalam Wilayah :

NO	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1.	Kiswono, S.H., M.H. NIP. 197404242000031002	Panitera Muda Perkara PTUN Bandung	Panitera Muda Perkara PTUN Jakarta	Tmt 31 Oktober 2025
2.	Fani Aria, S.H., M.Kn. NIP. 198902042012122001	Panitera Muda Hukum PTUN Padang	Panitera Muda Hukum PTUN Jakarta	Tmt 31 Oktober 2025

### Mutasi Keluar Wilayah

NO	NAMA/NIP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1.	Andi Fahmi Azis, S.H., M.H.	Hakim PTUN Jakarta	Hakim PTUN Semarang	TMT 06 Oktober 2025
2.	Irvan Mawardi, S.H., M.H.	Hakim PTUN Jakarta	Hakim Yustisial Pada Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan, BSDK MA	TMT 02 Oktober 2025

## LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

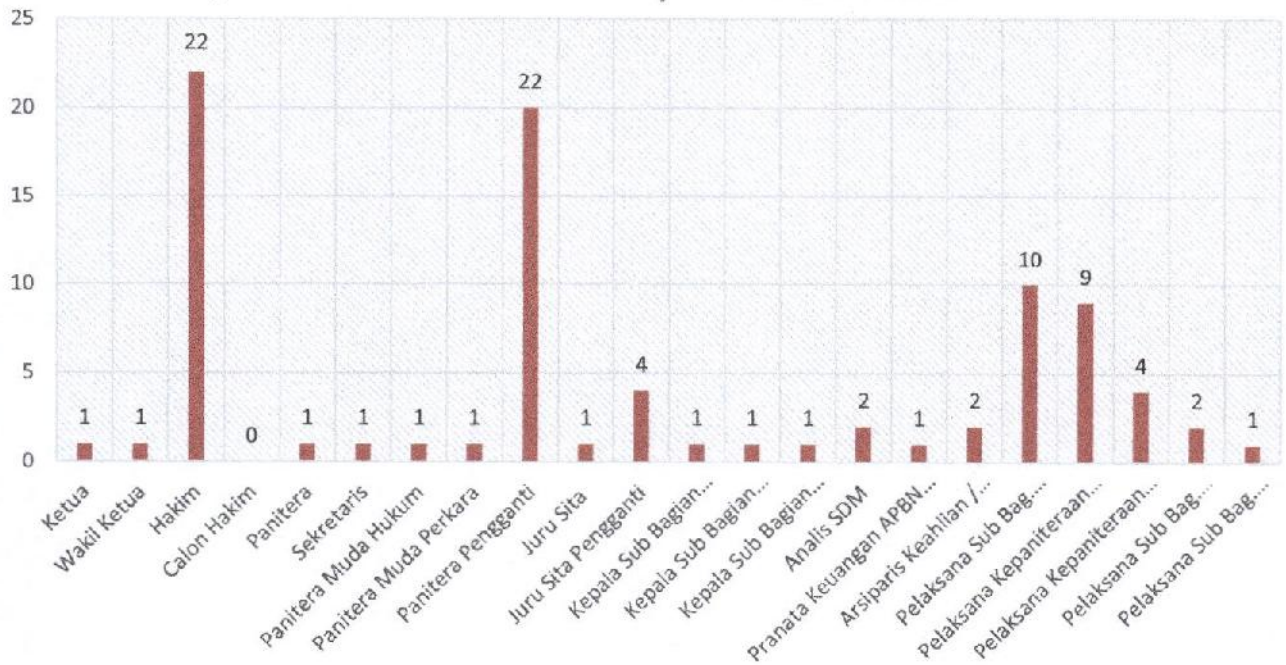
3.	Hj. Romlah, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum PTUN Jakarta	Panitera Pengganti PTTUN Jakarta	TMT 24 Oktober 2025
4.	Sri Hartanto, S.H., M.Kn.	Panitera Muda Perkara PTUN Jakarta	Panitera Pengganti PTTUN Jakarta	TMT 24 Oktober 2025
5.	Yusuf Amin, S.H.	Panitera Pengganti PTUN Jakarta	Panitera Pengganti PTTUN Jakarta	TMT 24 Oktober 2025
6.	Anitha Syahrini, S.H.	Panitera Pengganti PTUN Jakarta	Panitera Pengganti PTTUN Jakarta	TMT 24 Oktober 2025
7.	Sri Ambarwati, S.H., M.H.	Panitera Pengganti PTUN Jakarta	Panitera Pengganti PTTUN Jakarta	TMT 24 Oktober 2025
8.	Maria Magdhalena Hutapea, S.H., M.H.	Panitera Pengganti PTUN Jakarta	Panitera Pengganti PTTUN Jakarta	TMT 24 Oktober 2025

### DATA HAKIM / PEGAWAI BARU:

NO	NAMA	JABATAN	PENEMPATAN	KET
1.	Kiswono, S.H., M.H. NIP. 197404242000031002	Panitera Muda Perkara PTUN Jakarta	Panitera Muda Perkara PTUN Jakarta	Tmt 31 Oktober 2025
2.	Fani Aria, S.H., M.Kn. NIP. 198902042012122001	Panitera Muda Hukum PTUN Jakarta	Panitera Muda Hukum PTUN Jakarta	Tmt 31 Oktober 2025

# LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

## JABATAN FUNGSIONAL / STRUKTURAL



## KEPEGAWAIAN



## LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

- SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

a. Umum

1. Tata Persuratan :

Surat Masuk

NO	SUB. BAGIAN	SURAT MASUK				JUMLAH
		DARI	BIASA	PENTING	RAHASIA	
1		MAHKAMAH AGUNG RI	21	0	0	21
2		PT. TUN-Jakarta	4	0	0	4
3		BALITBANG DIKLAT KUMDIL	5	0	0	5
4	PERSURATAN	DIRJEND. BADIMIL TUN	11	0	1	12
5		KOMISI YUDISIAL	0	0	0	0
6		PERKARA/LAIN-LAIN	132	0	0	132
7		UMUM/LAIN-LAIN	22	0	0	22
<b>TOTAL</b>						<b>196</b>

Surat Keluar

NO	SUB	SURAT			JUMLAH
		BIASA	PENTING	RAHASIA	
1	Sub.Bag.Kepegawaian dan Ortala	96	0	0	96
2	Sub.Bag.Umum dan Keuangan	39	0	0	39
3	Sub.Perencanaan, TI,dan Pelaporan	3	0	0	3
4	Kepaniteraan Muda Perkara	138	0	0	138
5	Kepaniteraan Muda hukum	22	0	0	22
6	Lain-lain	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>					<b>298</b>

2) Tata Kearsipan :

Arsip - arsip yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertata dengan tertib melalui media penyimpanan, seperti file Ordner, Rak Arsip, Lemari Besi dan Arsip Data Komputer ( ADK ) sehingga memudahkan dalam pencarian.

3) Inventaris dan Persediaan :

Inventaris dan persediaan kantor dikelola dan di bukukan sesuai petunjuk yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor : 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, yakni menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara ( SIMAK BMN ) dan aplikasi Persediaan.

## LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

Untuk bulan Oktober Tahun 2025 aset Inventaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pengadaan barang / jasa sebagai berikut :

No	Nama Barang	Baik	Rusak Berat	Rusak Ringan	Jumlah
1	A.C. Split	4		28	32
2	Acces Point	5			5
3	Air Conditioning (AC)	18			18
4	Amplifier			3	3
5	Asbak Tinggi			1	1
6	Audio Mixing Console	1			1
7	Bangku Panjang Besi/Metal	7		17	24
8	Bracket Standing Peralatan	8			8
9	Brandkas			1	1
10	Buffet			1	1
11	Buku Lainnya	18			18
12	Camera Conference	1			1
13	Camera Digital	2			2
14	CCTV - Camera Control Television System	26			26
15	Digital LED Running Text	1			1
16	Dispenser	7			7
17	Facsimile	2			2
18	Filing Cabinet Besi	41		1	42
19	Filling Sealing	73			73
20	Finger Printer Time and Attendance Acces Control System	4			4
21	Gedung Pos Jaga Permanen	1			1
22	Genset	1			1
23	Jam Mekanis			6	6
24	Kipas Angin		3		3
25	Komponen/Alat Pengolah Data	26			26
26	Komputer Jaringan Lainnya	29			29
27	Kursi Besi/Metal	606		1	607
28	Kursi Kayu	55		14	69
29	Lambang Garuda Pancasila	6			6
30	Lambang Instansi	7			7
31	Lap Top	9			9
32	Layar Film/Projector	1			1
33	LCD Monitor	1			1
34	LCD Projector/Infocus	1			1
35	Lemari Besi/Metal	17	8	7	32
36	Lemari Kayu	2		22	24
37	Lemari Penyimpan	35			35
38	Loudspeaker	4		5	9
39	Meja Kerja Kayu	173		28	201
40	Meja Komputer			3	3
41	Meja Makan Besi	5			5
42	Meja Rapat	39			39
43	Meja Resepsionis	1		1	2
44	Mesin Absensi	1			1

## LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

45	Mesin Antrian	2			2
46	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1			1
47	Microphone	13			13
48	Microphone/Wireless MIC	1			1
49	Mimbar/Podium	1			1
50	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	1			1
51	Mixer	3			3
52	Mixer Sound Sistem	1			1
53	Modem	1			1
54	Monografi	2			2
55	Movitex Board	1			1
56	Note Book	23			23
57	P.C Unit	42			42
58	Palu Sidang	1		5	6
59	Panggung	2			2
60	Papan Gambar	1			1
61	Papan Pengumuman	6			6
62	Peralatan Komputer Lainnya	2			2
63	Perkakas Kantor Lainnya	10			10
64	Pesawat Telephone	18		24	42
65	Piagam	3			3
66	Piala	12			12
67	Printer (Peralatan Personal Komputer)	29		10	39
68	Public Address Branch Exchange (PABX)	1			1
69	Rak Besi	134		22	156
70	Rak Server	1			1
71	Router	5			5
72	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen		2		2
73	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen		2	2	4
74	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	8			8
75	Sedan	2		1	3
76	Sepeda Motor	7	1		8
77	Server	3			3
78	Sofa	27			27
79	Software Komputer		4		4
80	Sound System	1			1
81	Stempel Timbul/Bulat	1			1
82	Tabung Pemadam Api	9			9
83	Tanah Bangunan Gedung Kantor Pengadilan	1			1
84	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	4			4
85	Tangga Aluminium	1			1
86	Telepon Digital	4			4
87	Televisi			1	1
88	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1		1	2
89	Wireless	1			1
90	Workstation	1			1
	<b>Total</b>	<b>1626</b>	<b>20</b>	<b>205</b>	<b>1851</b>

Note : Tabung Pemadam Api berjumlah 24 Tabung, 12 tabung expired 2027, 12 tabung expired agustus 2025. baru terdaftar di siman 9 tabung.

## **LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA**

Sedang berkoordinasi dengan biro perlengkapan terkait penangannya.

#### 4) Perpustakaan :

Untuk Bulan Oktober 2025 Perpustakaan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak ada penerimaan buku atau majalah yang masuk.

# LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

## b. Keuangan

### Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA 01

#### LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program, Kegiatan, Output, SubOutput, Komponen, SubKomponen, Akun, Item,  
Periode Oktober 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 1 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>18.170.879.000</b>	<b>0</b>	<b>15.258.682.244</b>	<b>1.308.053.136</b>	<b>16.566.735.380</b>	<b>91,17%</b>	<b>1.604.143.620</b>
WA Program Dukungan Manajemen	18.170.879.000	0	15.258.682.244	1.308.053.136	16.566.735.380	91,17%	1.604.143.620
WA 1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	222.190.000	0	139.500.000	0	139.500.000	62,78%	82.690.000
EBA Layanan Sarana dan Prasarana Internal	222.190.000	0	139.500.000	0	139.500.000	62,78%	82.690.000
EBS 951 Layanan Sarana Internal	222.190.000	0	139.500.000	0	139.500.000	62,78%	82.690.000
003 Pengadaan peralatan termasuk perbaikan	222.190.000	0	139.500.000	0	139.500.000	62,78%	82.690.000
053.0A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	222.190.000	0	139.500.000	0	139.500.000	62,78%	82.690.000
502111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	222.190.000	0	139.500.000	0	139.500.000	62,78%	82.690.000
000001. AC 2 Pk	89.600.000	0	89.600.000	0	89.600.000	99,90%	90.000
000002. Mesin Antrian Sidang	50.000.000	0	49.900.000	0	49.900.000	99,80%	100.000
000103. Pengadaan Meubelair	82.500.000	0	0	0	0	0,00%	82.500.000
WA 0980 Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	17.948.689.000	0	15.119.182.244	1.308.053.136	16.427.235.380	91,52%	1.521.453.620
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	17.948.689.000	0	15.119.182.244	1.308.053.136	16.427.235.380	91,52%	1.521.453.620
EBA 960 Layanan Umum	700.000	0	0	0	0	0,00%	700.000
001 Dukungan Manajemen non Operasional Pengadilan	700.000	0	0	0	0	0,00%	700.000
051.0A Pengadaan Peralatan dan Mesin Ekstrakomputer	700.000	0	0	0	0	0,00%	700.000
521252 Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomputer	700.000	0	0	0	0	0,00%	700.000
000095. Printer Hp Laserjet P1102	700.000	0	0	0	0	0,00%	700.000
EBA 994 Layanan Perkantoran	17.048.689.000	0	15.119.182.244	1.308.053.136	16.427.235.380	91,55%	1.520.453.620
001 Gaji dan Tunjangan	15.482.871.000	0	13.365.265.388	1.185.415.286	14.550.680.674	93,94%	1.022.190.326
001.0A Gaji dan Tunjangan	15.482.871.000	0	13.365.265.388	1.185.415.286	14.550.680.674	93,94%	1.022.190.326
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	4.682.745.000	0	4.149.372.840	339.589.000	4.488.961.840	100,00%	406.216.840
000003. Belanja Gaji Pokok PNS	3.383.449.000	0	3.450.682.100	339.589.000	3.789.671.100	112,01%	-406.222.100
000004. Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji ke 14)	347.323.000	0	347.322.120	0	347.322.120	100,00%	880
000005. Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji ke 13)	351.973.000	0	351.968.020	0	351.968.020	100,00%	4.980
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	61.000	0	50.990	4.141	55.121	90,36%	5.879

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

#### LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program, Kegiatan, Output, SubOutput, Komponen, SubKomponen, Akun, Item,  
Periode Oktober 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 2 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000006. Belanja Pembulatan Gaji PNS	51.000	0	41.876	4.141	46.017	90,23%	4.983
000007. Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke 12)	5.000	0	4.408	0	4.408	88,16%	592
000008. Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke 14)	5.000	0	4.696	0	4.696	93,92%	304
511121 Belanja Tunj. Suami/istri PNS	369.454.000	0	368.880.802	26.308.458	395.189.260	90,72%	34.264.740
000009. Belanja Tunjangan Suami/istri PNS	317.710.000	0	257.158.270	26.308.458	283.466.728	89,22%	34.243.272
000010. Belanja Tunjangan Suami/istri PNS (Gaji ke 13)	26.047.000	0	25.042.226	0	25.042.226	96,18%	4.774
000011. Belanja Tunjangan Suami/istri PNS (Gaji ke 14)	25.697.000	0	25.039.396	0	25.039.396	97,45%	37.604
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	119.846.000	0	101.274.422	8.885.376	110.159.798	91,81%	9.686.202
000012. Belanja Tunjangan Anak PNS	104.208.000	0	84.574.138	8.885.376	93.459.514	90,54%	9.747.486
000013. Belanja Tunjangan Anak PNS (Gaji ke 13)	8.455.000	0	8.444.286	0	8.444.286	99,87%	10.714
000014. Belanja Tunjangan Anak PNS (Gaji ke 14)	8.305.000	0	8.250.018	0	8.250.018	99,41%	46.982
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	43.200.000	0	32.040.000	2.880.000	34.920.000	80,83%	8.280.000
000015. Belanja Tunjangan Struktural PNS	37.440.000	0	28.280.000	2.880.000	31.160.000	77,88%	8.280.000
000016. Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 12)	2.880.000	0	2.880.000	0	2.880.000	100,00%	0
000017. Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)	2.880.000	0	2.880.000	0	2.880.000	100,00%	0
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	878.015.000	0	734.280.000	14.525.000	748.805.000	85,29%	129.210.000
000018. Belanja Tunj. Fungsional PNS	851.005.000	0	727.270.000	14.525.000	741.795.000	87,17%	109.210.000
000019. Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)	13.505.000	0	13.505.000	0	13.505.000	100,00%	0
000020. Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)	13.505.000	0	13.505.000	0	13.505.000	100,00%	0
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	122.197.000	0	105.304.758	125.411	105.430.169	86,28%	16.766.831
000021. Belanja Tunj. PPh PNS	96.434.000	0	79.543.653	125.411	79.669.064	82,62%	16.784.936
000022. Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)	13.210.000	0	13.206.943	0	13.206.943	99,99%	1.057
000023. Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)	12.533.000	0	12.332.162	0	12.332.162	98,39%	839
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	237.525.000	0	214.942.565	18.032.580	232.975.146	98,47%	24.549.854
000024. Belanja Tunj. Beras PNS	237.525.000	0	214.942.565	18.032.580	232.975.146	98,47%	24.549.854
511129 Belanja Uang Makan PNS	1.051.011.000	0	449.174.000	20.198.000	469.372.000	44,66%	581.639.000
000025. Gaji Iv (29 ang x 22 hr x 12 Bln)	346.013.000	0	217.209.000	32.595.000	249.804.000	72,48%	96.209.000

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

# LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

## LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025 Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item; Periode Oktober 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 3 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d Periode	%	
000026. Gol II ( 41 org x 22 Hr x 12 Bln )	559.558.000	0	206.845.000	22.718.000	229.363.000	40.96 %	330.595.000
000027. Gol II ( 10 org x 22 Hr x 12 Bln )	92.408.000	0	20.440.000	3.250.000	23.690.000	25.64 %	68.708.000
000028. Gol I ( 1 org x 22 Hr x 12 Bln )	9.240.000	0	4.830.000	830.000	5.660.000	59.99 %	3.780.000
511151. Belanja Tunjangan Umum PNS	73.854.000	0	53.443.000	3.125.000	56.570.000	76.81 %	17.084.000
000029. Belanja Tunjangan Umum PNS	63.845.000	0	43.855.000	3.125.000	46.980.000	73.58 %	16.905.000
000030. Belanja Tunjangan Umum PNS ( gaji ke 13 )	4.902.000	0	4.795.000	0	4.795.000	97.82 %	107.000
000031. Belanja Tunjangan Umum PNS ( gaji ke 14 )	4.907.000	0	4.795.000	0	4.795.000	97.72 %	112.000
511324. Belanja Tunj. PPH Pejabat Negara	1.167.789.000	0	1.019.153.916	76.643.078	1.095.796.994	92.95 %	92.000.406
000100. Belanja Tunjangan PPH Pejabat Negara	837.324.000	0	698.973.867	76.643.078	775.616.945	89.01 %	91.939.055
000101. Belanja Tunjangan PPH Pejabat Negara ( gaji ke 13 )	177.014.000	0	177.013.108	0	177.013.108	100.00 %	692
000102. Belanja Tunjangan PPH Pejabat Negara ( gaji ke 14 )	173.461.000	0	173.460.541	0	173.460.541	100.00 %	459
511339. Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	7.209.703.000	0	6.009.800.000	373.200.000	6.383.000.000	89.50 %	686.703.000
000057. Belanja Tunjangan Pejabat Negara ( gaji ke 13 )	1.062.208.000	0	1.062.200.000	0	1.062.200.000	100.00 %	0
000058. Belanja Tunjangan Pejabat Negara ( gaji ke 14 )	522.108.000	0	522.100.000	0	522.100.000	100.00 %	0
000059. Belanja Tunjangan Pejabat Negara	5.685.400.000	0	4.425.500.000	373.200.000	4.798.700.000	87.92 %	686.703.000
511611. Belanja Gaji Pokok PPPK	39.600.000	0	87.483.000	29.450.500	116.933.500	293.30 %	-77.338.500
000032. Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 14)	2.858.000	0	2.858.800	0	2.858.800	99.99 %	200
000033. Belanja Gaji Pokok PPPK	30.882.000	0	81.771.400	29.450.500	111.221.900	326.26 %	-77.339.900
000034. Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 13)	2.859.000	0	2.858.800	0	2.858.800	99.99 %	200
511619. Belanja Pembulatan Gaji PPPK	7.000	0	2.504	920	3.424	48.91 %	3.576
000035. Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 13)	1.000	0	80	0	80	8.00 %	920
000036. Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 14)	1.000	0	80	0	80	8.00 %	920
000037. Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.000	0	2.344	920	3.264	65.28 %	1.736
511621. Belanja Tunjangan Suasmita PPPK	3.704.000	0	2.719.300	1.359.690	4.079.070	110.11 %	-375.070
000038. Belanja Tunjangan Suasmita PPPK (gaji ke 13)	264.000	0	0	0	0	0.00 %	264.000
000039. Belanja Tunjangan Suasmita PPPK	3.176.000	0	2.719.300	1.359.690	4.079.070	126.43 %	-903.070

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

## LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025 Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item; Periode Oktober 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 4 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d Periode	%	
000040. Belanja Tunjangan Suasmita PPPK (gaji ke 14)	264.000	0	0	0	0	0.00 %	264.000
511622. Belanja Tunjangan Anak PPPK	1.480.000	0	630.544	315.272	945.816	63.91 %	534.184
000041. Belanja Tunjangan Anak PPPK	1.270.000	0	630.544	315.272	945.816	74.47 %	324.184
000042. Belanja Tunjangan Anak PPPK (gaji ke 13)	105.000	0	0	0	0	0.00 %	105.000
000043. Belanja Tunjangan Anak PPPK (gaji ke 14)	105.000	0	0	0	0	0.00 %	105.000
511624. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4.900.000	0	4.200.000	350.000	4.550.000	92.86 %	350.000
000044. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4.200.000	0	3.900.000	350.000	4.250.000	91.67 %	350.000
000045. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (gaji ke 13)	350.000	0	350.000	0	350.000	100.00 %	0
000046. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (gaji ke 14)	350.000	0	350.000	0	350.000	100.00 %	0
511625. Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.004.000	0	3.910.680	1.593.240	5.503.920	135.77 %	-1.449.920
000047. Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.476.000	0	3.705.840	1.593.240	5.309.080	154.17 %	-1.833.080
000048. Belanja Tunjangan Beras PPPK (gaji ke 13)	289.000	0	72.420	0	72.420	25.06 %	216.580
000049. Belanja Tunjangan Beras PPPK (gaji ke 14)	289.000	0	72.420	0	72.420	25.06 %	216.580
511628. Belanja Uang Makan PPPK	31.500.000	0	5.005.090	8.022.000	13.027.090	41.36 %	18.473.000
000050. Belanja Uang Makan PPPK	31.500.000	0	5.005.090	8.022.000	13.027.090	41.36 %	18.473.000
511633. Belanja Tunjangan Umum PPPK	1.677.000	0	3.610.090	1.805.000	5.415.090	322.90 %	-3.738.000
000104. Belanja Tunjangan Umum PPPK	1.677.000	0	3.610.090	1.805.000	5.415.090	322.90 %	-3.738.000
002 Operasi dan Pemeliharaan Kantor	3.454.919.000	0	1.613.916.000	142.817.870	1.756.733.870	78.70 %	450.203.472
002.0A KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERHANTARAN	539.627.000	0	535.738.926	2.000.000	537.738.926	99.66 %	1.828.074
021111. Belanja Kebutuhan Perkantoran	539.627.000	0	535.738.926	2.000.000	537.738.926	99.66 %	1.828.074
000051. Kebutuhan sehari-hari Perkantoran	20.474.000	0	22.731.852	2.000.000	24.731.852	93.65 %	1.682.148
000052. Prambaks ( 6 org x 8 bulan )	229.680.000	0	229.680.000	0	229.680.000	100.00 %	0
000053. Selpam ( 5 org x 8 Bln )	224.774.000	0	224.828.074	0	224.828.074	99.94 %	145.926
000054. THR Prambaks 6 Org x 1 Bln )	30.624.000	0	30.624.000	0	30.624.000	100.00 %	0
000055. THR Selpam ( 5 org x 1 bln )	28.075.000	0	28.075.000	0	28.075.000	100.00 %	0
002.0B LANGGANAN DAYA JASA	233.400.000	0	222.727.985	687.284	223.415.279	95.72 %	9.984.721
021111. Belanja Kebutuhan Perkantoran	195.600.000	0	191.693.367	311.284	192.004.651	97.66 %	4.595.349

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

# LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

## LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program, Kegiatan, Output, SubOutput, Komponen, SubKomponen, Akun, Item,  
Periode Oktober 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 5 dari 7

Urutan	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000050. Langganan Internet	190.000.000	0	189.960.000	0	189.960.000	99,98 %	40.000
000057. Lisensi Video Conference	6.500.000	0	1.735.397	311.284	2.046.681	31,01 %	4.553.319
521114. Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3.800.000	0	2.379.000	370.000	2.750.000	72,50 %	1.045.000
000058. Biaya Pengiriman Surat Dinas	3.800.000	0	2.379.000	370.000	2.750.000	72,50 %	1.045.000
522112. Belanja Langganan Telepon	6.000.000	0	2.673.598	0	2.673.598	44,56 %	3.326.402
000059. Langganan Telephone	6.000.000	0	2.673.598	0	2.673.598	44,56 %	3.326.402
522113. Belanja Langganan Air	1.000.000	0	0	0	0	0,00 %	1.000.000
000060. Langganan Air	1.000.000	0	0	0	0	0,00 %	1.000.000
522141. Belanja Sewa	25.000.000	0	25.980.000	0	25.980.000	99,92 %	20.000
000061. Langganan Web Hosting	25.000.000	0	25.980.000	0	25.980.000	99,92 %	20.000
002 00. Pemeliharaan Kantor	553.547.000	0	382.058.871	38.651.800	420.710.671	75,95 %	133.236.329
523111. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	241.696.000	0	189.628.600	0	189.628.600	78,46 %	52.067.400
000062. Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan	241.696.000	0	189.628.600	0	189.628.600	78,46 %	52.067.400
523119. Belanja Pemeliharaan dan Bangunan Lainnya	151.000	0	0	0	0	0,00 %	151.000
000063. Pemeliharaan Rumah Dinas ( 4 Unit )	151.000	0	0	0	0	0,00 %	151.000
523121. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	312.100.000	0	192.430.271	38.651.800	231.082.071	74,04 %	81.017.929
000064. Pemeliharaan Lift	54.300.000	0	54.390.000	0	54.390.000	99,90 %	110.000
000065. Bensin Motor Sewa Ketua	27.000.000	0	16.051.825	3.500.000	19.551.825	72,41 %	7.448.175
000066. Pemeliharaan AC Cassete	37.000.000	0	29.257.300	832.500	30.089.800	81,32 %	6.910.200
000067. Pemeliharaan Laptop	14.600.000	0	9.046.300	3.290.000	12.336.300	84,50 %	2.263.500
000068. Pemeliharaan PC	15.330.000	0	3.000.000	2.500.000	5.500.000	36,20 %	9.780.000
000069. Pemeliharaan Printer	10.350.000	0	3.218.000	0	3.218.000	31,09 %	7.132.000
000070. Pemeliharaan AC Split	26.060.000	0	25.109.950	0	25.109.950	89,49 %	2.950.050
000071. Pemeliharaan Mesin Pompa	29.760.000	0	6.800.600	20.250.000	27.050.600	91,23 %	2.709.400
000072. Kendaraan Roda 2	9.000.000	0	1.291.900	0	1.291.900	14,35 %	7.708.100
000073. Kendaraan Roda 4	81.000.000	0	42.214.796	8.229.300	50.444.096	62,28 %	30.555.904
000074. Pemeliharaan Barang Elektronik Lainnya	5.500.000	0	1.950.000	0	1.950.000	35,45 %	3.550.000

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

## LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program, Kegiatan, Output, SubOutput, Komponen, SubKomponen, Akun, Item,  
Periode Oktober 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 6 dari 7

Urutan	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
002 00. Operasional Lainnya	232.914.000	0	82.568.546	95.508.786	178.077.332	76,89 %	50.816.668
521111. Belanja Kebutuhan Perkantoran	90.904.000	0	0	82.918.000	82.918.000	91,21 %	7.986.000
000074. Pakaian Dinas Pramubhakti	4.428.000	0	0	3.690.000	3.690.000	83,33 %	738.000
000075. Pakaian Dinas Hakim 26 Org	21.788.000	0	0	21.788.000	21.788.000	100,00 %	0
000076. Pakaian Dinas Pegawai 60 Org	57.984.000	0	0	50.736.000	50.736.000	87,50 %	7.248.000
000077. Pakaian Dinas CPNS 2 Org	1.676.000	0	0	1.676.000	1.676.000	100,00 %	0
000078. Pakaian Dinas PPPK 1 Org	838.000	0	0	838.000	838.000	100,00 %	0
000079. Pakaian Dinas Satpam	4.190.000	0	0	4.190.000	4.190.000	100,00 %	0
521113. Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	73.760.000	0	48.120.000	4.960.000	53.080.000	71,99 %	20.680.000
000080. Honor PPABP	5.880.000	0	0	490.000	490.000	8,33 %	5.390.000
000081. Honor KPA	21.600.000	0	12.600.000	1.800.000	14.400.000	66,67 %	7.200.000
000082. Honor PPK	14.000.000	0	14.000.000	0	14.000.000	100,00 %	0
000083. Honor Penguji Tagihan Penandatangan SPM	9.000.000	0	6.000.000	750.000	6.750.000	75,00 %	2.250.000
000084. Honor Bendahara Penerimaan	3.500.000	0	2.400.000	300.000	2.700.000	75,00 %	900.000
000085. Honor Bendahara Pengeluaran	7.320.000	0	3.280.000	660.000	3.940.000	50,00 %	3.380.000
000086. Honor Staf Keuangan (3 org x 12 Bln)	11.760.000	0	7.840.000	980.000	8.820.000	75,00 %	2.940.000
521611. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	66.200.000	0	35.468.546	7.610.786	43.079.332	65,12 %	23.120.668
000087. Biaya perkantoran sehari-hari (91 Org)	66.200.000	0	35.468.546	7.610.786	43.079.332	65,12 %	23.120.668
002 00. Konsultasi ke Pusat/Tingkat Bawah	23.400.000	0	992.000	150.000	1.142.000	4,88 %	22.258.000
524111. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.200.000	0	992.000	0	992.000	4,47 %	21.208.000
000088. Transportasi (2 org x 3 kegiatan)	2.700.000	0	0	0	0	0,00 %	2.700.000
000089. Uang Harian (2 org x 1 hari x 3 kegiatan)	4.950.000	0	0	0	0	0,00 %	4.950.000
000090. Tiket (2 org x 1 hari x 3 kegiatan)	6.250.000	0	0	0	0	0,00 %	6.250.000
000091. Penginapan (2 org x 1 hari x 3 kegiatan)	6.300.000	0	992.000	0	992.000	15,75 %	5.308.000
524113. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.200.000	0	0	150.000	150.000	12,50 %	1.050.000
000092. Perjalanan Dinas Dalam Kota (2 Org x 4 keg)	1.200.000	0	0	150.000	150.000	12,50 %	1.050.000
002 00. Konsultasi ke KPPN/KANWIL/DJPO/KPKS/KANWIL/DJKN/SPK/SPK2	1.050.000	0	120.320	0	120.320	11,46 %	929.680

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

# LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

**LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025**  
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;  
Periode Oktober 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
Satuan Kerja : 526732 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 7 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.050.000	0	120.320	0	120.320	11,45 %	929.680
000093 Perjalanan Dinas Dalam Kota (1 Org x 7 kegg)	1.050.000	0	120.320	0	120.320	11,45 %	929.680
002.01 Hak dan Fasilitas Keuangan Hakim dan Hakim Ad Hoc	870.480.000	0	588.090.000	3.580.000	594.270.000	68,27 %	276.210.000
522141 Belanja Sewa	870.480.000	0	588.090.000	3.580.000	594.270.000	68,27 %	276.210.000
000094 Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim (20 Orang x 12 Bln)	870.480.000	0	588.090.000	3.580.000	594.270.000	68,27 %	276.210.000
ERD Layanan Manajemen Kinerja Internal	300.000	0	0	0	0	0,00 %	300.000
ERD 503 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	300.000	0	0	0	0	0,00 %	300.000
001 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	300.000	0	0	0	0	0,00 %	300.000
001.0A Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	300.000	0	0	0	0	0,00 %	300.000
521211 Belanja Bahan	300.000	0	0	0	0	0,00 %	300.000
000008 Cetak Bahan Pemantauan dan Evaluasi	300.000	0	0	0	0	0,00 %	300.000

# LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

## Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA 05

### LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;  
Periode Oktober 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : 05 Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)  
Satuan Kerja : 526733 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 1 dari 2

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>63.250.000</b>	<b>0</b>	<b>26.743.000</b>	<b>3.889.000</b>	<b>30.625.000</b>	<b>48,42 %</b>	<b>32.625.000</b>
BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	63.250.000	0	26.743.000	3.889.000	30.625.000	48,42 %	32.625.000
BF 1059 Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	63.250.000	0	26.743.000	3.889.000	30.625.000	48,42 %	32.625.000
AEA Koordinasi	29.845.000	0	8.288.000	1.489.000	9.769.000	32,79 %	20.085.000
AEA 002 Dukungan Penyelesaian Perkara	29.845.000	0	8.288.000	1.489.000	9.769.000	32,79 %	20.085.000
051 Pelaksanaan Pengawasan Sidang	29.845.000	0	8.288.000	1.489.000	9.769.000	32,79 %	20.085.000
051 0A Pelaksanaan	29.845.000	0	8.288.000	1.489.000	9.769.000	32,79 %	20.085.000
521211 Belanja Bahan	29.845.000	0	8.288.000	1.489.000	9.769.000	32,79 %	20.085.000
000001 Konsumsi Pengamanan Sidang (25 org x 30 kali)	29.845.000	0	8.288.000	1.489.000	9.769.000	32,79 %	20.085.000
BKA Perkara Hukum Perseorangan	405.000	0	405.000	0	405.000	100,00 %	0
BKA 001 Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	405.000	0	405.000	0	405.000	100,00 %	0
051 Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara	405.000	0	405.000	0	405.000	100,00 %	0
051 0A Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama	405.000	0	405.000	0	405.000	100,00 %	0
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	180.000	0	180.000	0	180.000	100,00 %	0
000002 Pengiriman Pembertantuan Panggilan	180.000	0	180.000	0	180.000	100,00 %	0
521211 Belanja Bahan	225.000	0	225.000	0	225.000	100,00 %	0
000003 Pengandaian dan Pengisian Bekas Perkara	100.000	0	100.000	0	100.000	100,00 %	0
000004 Alat Tulis Kantor	125.000	0	125.000	0	125.000	100,00 %	0
BKA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	33.000.000	0	18.000.000	2.400.000	20.400.000	62,00 %	12.540.000
BKA 001 Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	33.000.000	0	18.000.000	2.400.000	20.400.000	62,00 %	12.540.000
051 Pos Bantuan Hukum	33.000.000	0	18.000.000	2.400.000	20.400.000	62,00 %	12.540.000
051 0A tanpa sub komponen	33.000.000	0	18.000.000	2.400.000	20.400.000	62,00 %	12.540.000
521211 Belanja Bahan	4.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	30,00 %	2.940.000
000009 ATK Layanan Pos Bantuan Hukum	4.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	30,00 %	2.940.000
521231 Belanja Jasa Konsultansi	28.800.000	0	16.800.000	2.400.000	19.200.000	66,67 %	9.600.000
000010 Jasa Layanan Konsultansi Hukum (3 jam x 2 Hari x 4	28.800.000	0	16.800.000	2.400.000	19.200.000	66,67 %	9.600.000

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : 05 Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)  
Satuan Kerja : 526733 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 2 dari 2

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
Mg x 12 bln)	28.800.000	0	16.800.000	2.400.000			9.600.000

## LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

### SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

- a. Teknologi Informasi, pengelolaan website dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, yaitu dengan melakukan pembaruan konten berita website yaitu dengan adanya Rapat Bulanan untuk Bulan Oktober 2025 agenda rapat meliputi :
- Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan dan mengingatkan kembali kepada seluruh Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan seluruh Pegawai agar dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan secara profesional dengan tetap berpegang teguh dan berpedoman pada KEPPH, Kode Etik Kepaniteraan, Kode Etik ASN dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7, 8 dan 9 Tahun 2016 serta Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2017.
  - Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan untuk kedisiplinan Hakim dan ASN sudah baik diharapkan untuk kedepannya semakin baik, apabila izin telat masuk kantor maupun izin pulang cepat untuk selalu memakai surat izin.
  - Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan untuk memonitoring dan menindaklanjuti hasil temuan dari BAWAS dan BPK dan tidak mengulangi lagi temuan tersebut.
  - Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan ada surat masuk dari Kepaniteraan PTUN untuk kepaniteraan PTUN Jakarta berkaitan dengan kekurangan berkas agar segera dilengkapi.
  - Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan Kepaniteraan Perkara adalah garda terdepan untuk Pengadilan karena kinerja PTUN Jakarta dapat dinilai oleh karena itu ASN harus Profesional dan disiplin.
  - Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan berkaitan permohonan ASN untuk menaiki jabatan tertentu agar Bapak Wakil Ketua PTUN Jakarta mengadakan Baperjakat.
  - Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan untuk tahun depan direncanakan oleh Ditjen Badimiltun akan diberlakukan e-register yang akan membantu kinerja lebih cepat dan efektif.

## LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

- Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan bagian persuratan di PTSP akan dirolling dan SK Penunjukan akan segera dibuat dan di *approve* oleh Ketua PTUN Jakarta.
- Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan agar integritas selalu dijaga serta agar selalu berhati-hati, tidak bertemu dengan pihak apabila ada yang terbukti maka SMAP dan WBK dapat dicabut.
- Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan untuk para Hakim ada kegiatan di akhir minggu menjadi panitia di acara Dr. Disiplin F. Manao, S.H., M.H. mohon jam 05.00 pagi sudah *stand by* di lokasi agar acara tersebut dapat sukses.
- Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan untuk perubahan status PTUN Jakarta menjadi 1A Khusus sudah diupayakan dan sedang dikaji oleh Mahkamah Agung RI.
- Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengingatkan kembali ke pada PPPK agar tetap menja perilaku dengan baik dan mengerjakan semua instruksi dari atasan.
- Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan kerja sama dengan pihak ketiga harus bertemu juga dengan Ketua PTUN Jakarta.
- Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan untuk kegiatan olahraga agar seluruh pegawai mengikuti kegiatan tersebut.
- Selanjutnya Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan beberapa hal yaitu :
  - a. Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menghadiri Ikhtisar SATGASUS Bawas beberapa hari yang lalu yang disampaikan oleh Ketua PTTUN Jakarta.
  - b. Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan PTTUN Jakarta tetap meminta Ikhtisar/Simpulan temuan dari Satgasus.
- Panitia Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan bahwa :
  - a. Pengembalian sisa Panjar selama tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 pertanggal 17 Oktober yang sudah dikembalikan adalah sebesar Rp. 605.707.078,-.
  - b. Mengenai Box File per tanggal 17 Oktober 2025 telah terbit sk terbaru maka dari itu untuk perkara setelah tanggal tersebut telah ada Box File nya.

## **LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA**

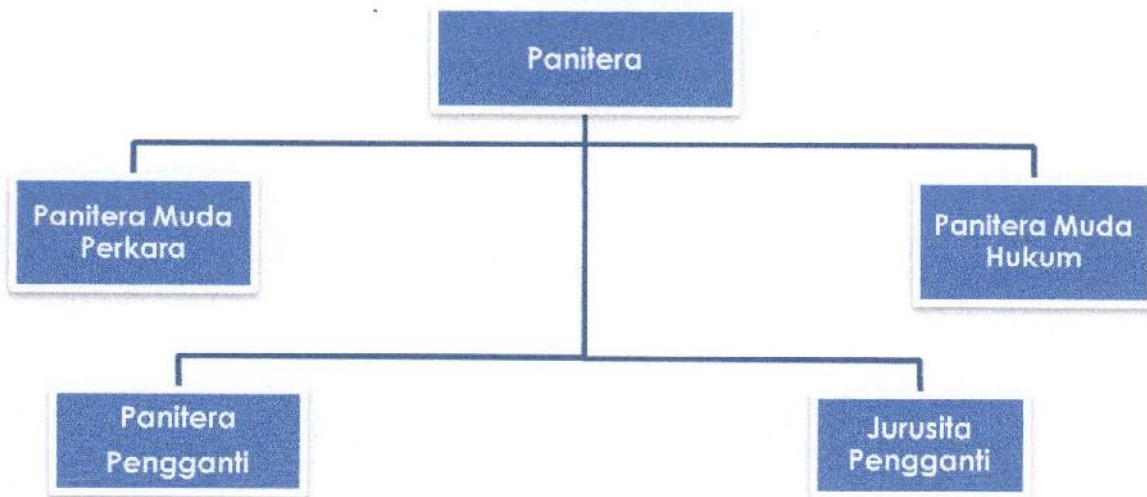
- Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan bahwa:
  - a. Realisasi Anggaran Per bulan Oktober 2025 sudah mencapai 91.17% untuk DIPA 01 dan DIPA 05 sebesar 48.42% untuk DIPA 05 sedang proses penyerapan.
  - b. Sekretaris menyampaikan nanti akan diadakan MCU untuk para Hakim dan untuk non hakim diperbolehkan ikut namun biaya ditanggung sendiri apabila ada yang tertarik bisa menghubungi Bapak Hakim, Bapak Mohammad Hery Indrawan Patiradja.
  
- b. Pelaporan, jenis laporan yang di kerjakan pada sub bagian ini merupakan laporan yg bersifat umum pada Satuan Kerja dan laporan yang bersifat khusus terkait Kesekretariatan.

# LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

## B. KEPANITERAAN

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

### Struktur Organisasi Kepaniteraan



#### 1. Kepaniteraan Muda Perkara

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang tata usaha negara :

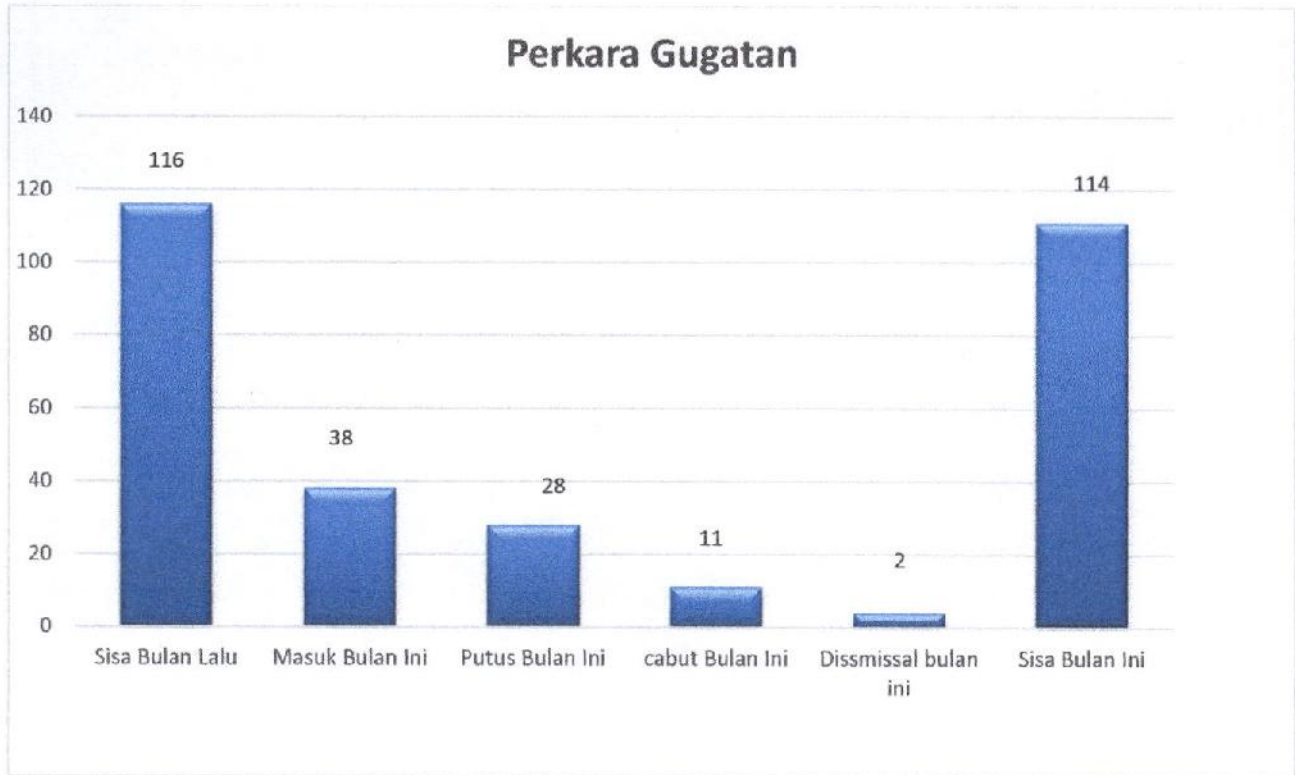
- Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyiapkan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara TUN.
- Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan.
- Menerima Gugatan Permohonan Banding, Kasasi, PK, Plw dan Eksekusi.
- Meneliti berkas perkara masuk.
- Mencatat setiap perkara yang diterima dalam register.
- Memberi nomor register pada surat gugatan.
- Mencatat gugatan yang diterima lewat pos.
- Mencatat perkara yang lewat untuk diteruskan kepada pengadilan yang berwenang
- Membuat SKUM setelah bayar lunas panjer perkara di bank.
- Membuat jurnal keuangan perkara.

## **LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA**

- Membuat Laporan bulanan keuangan perkara.
- Membuat laporan bulanan keadaan perkara.
- Membuat/memberitahukan akta/pernyataan, memori, kontra dalam perkara Banding, kasasi dan PK kepada para pihak.
- Memberitahukan kepada para pihak untuk melihat berkas yang akan dikirim (Inzage)
- Mengirim berkas perkara Banding, kasasi dan PK (Bundel A dan B).
- Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan selaku panitera pengganti, membuat berita acara dan putusan.
- Mencatat jalannya sidang yang ditetapkan oleh majelis.
- Memberitahukan isi putusan kepada para pihak.
- Menyerahkan arsip berkas perkara incraht kepada panmud Hukum.
- Melakukan bimbingan kepada staf pandmud perkara.
- Mengusulkan mutasi dalam rangka penyegaran dan karier pegawai staf pandmud perkara.
- Mengevaluasi hasil pekerjaan tahun 2023.
- Membuat SKP. 2 pegawai staf pandmud perkara
- Menyusun rencana kerja panmud perkara tahun 2024

# LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

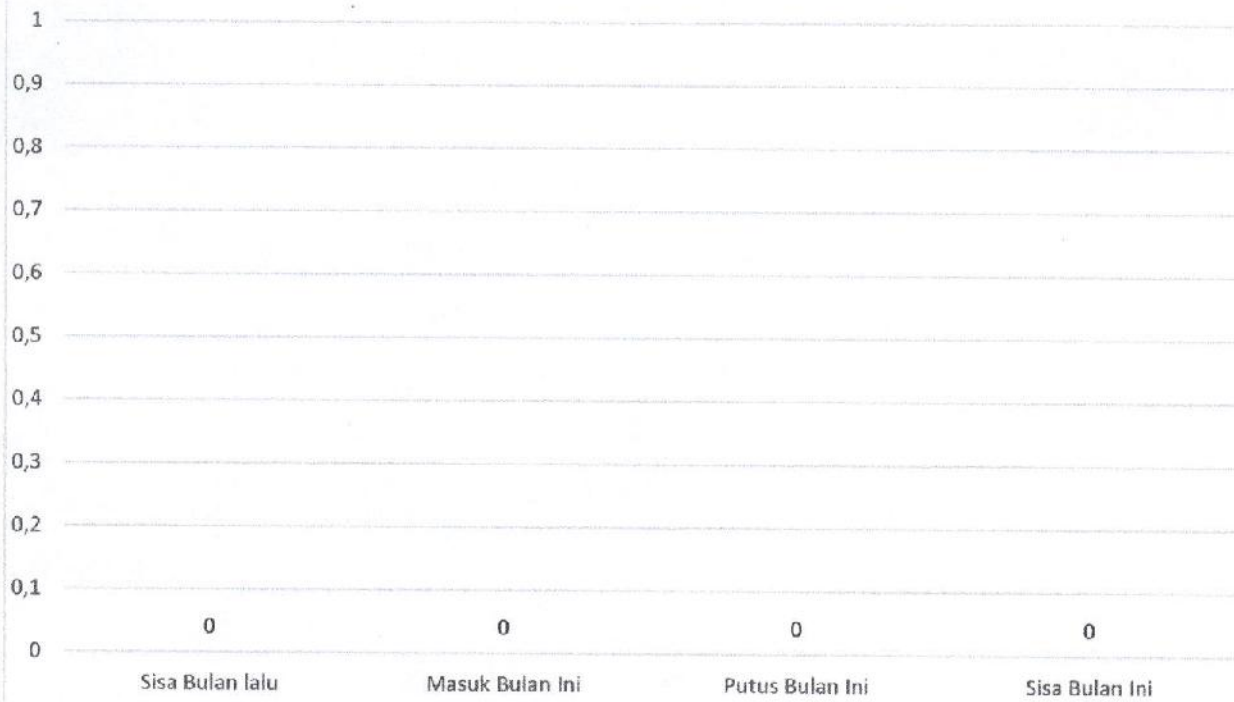
## Keadaan Perkara



Catatan : Total Putus bulan ini adalah ( di cabut + dismissal + Putus bulan ini )  
 $11 + 4 + 28 = 43$  Perkara

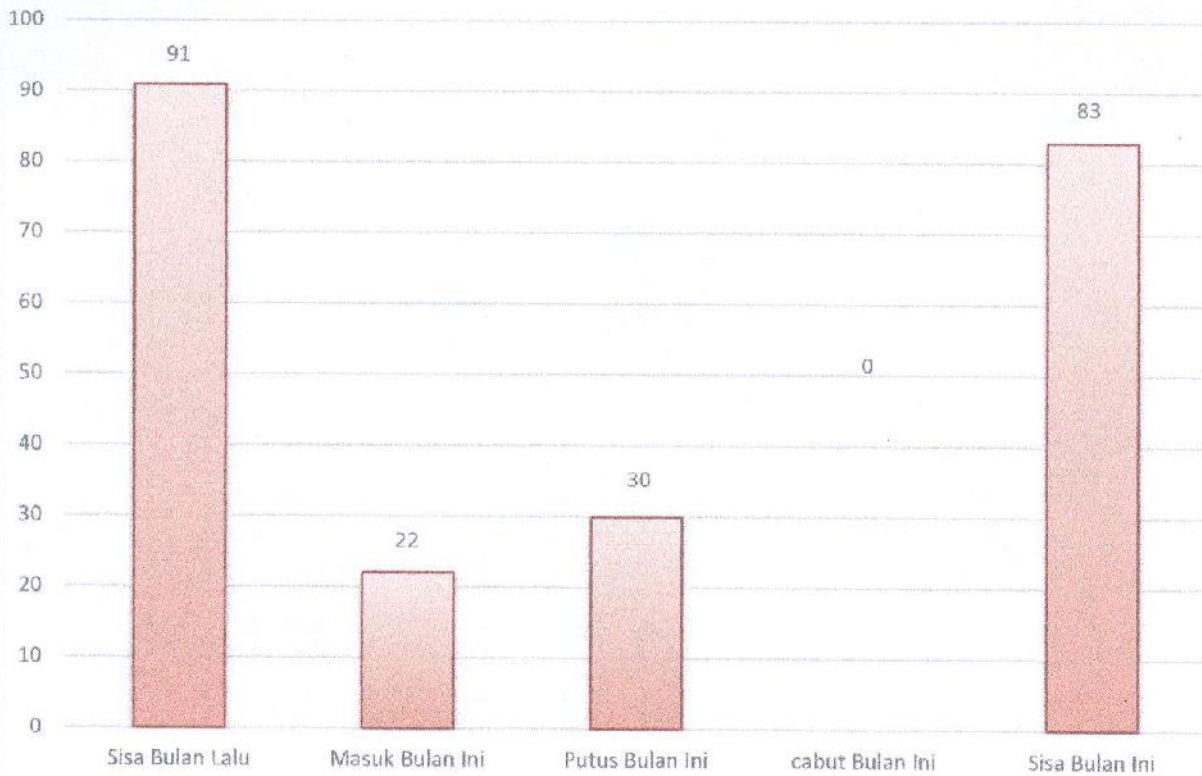
# LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

## Perkara Perlawanan

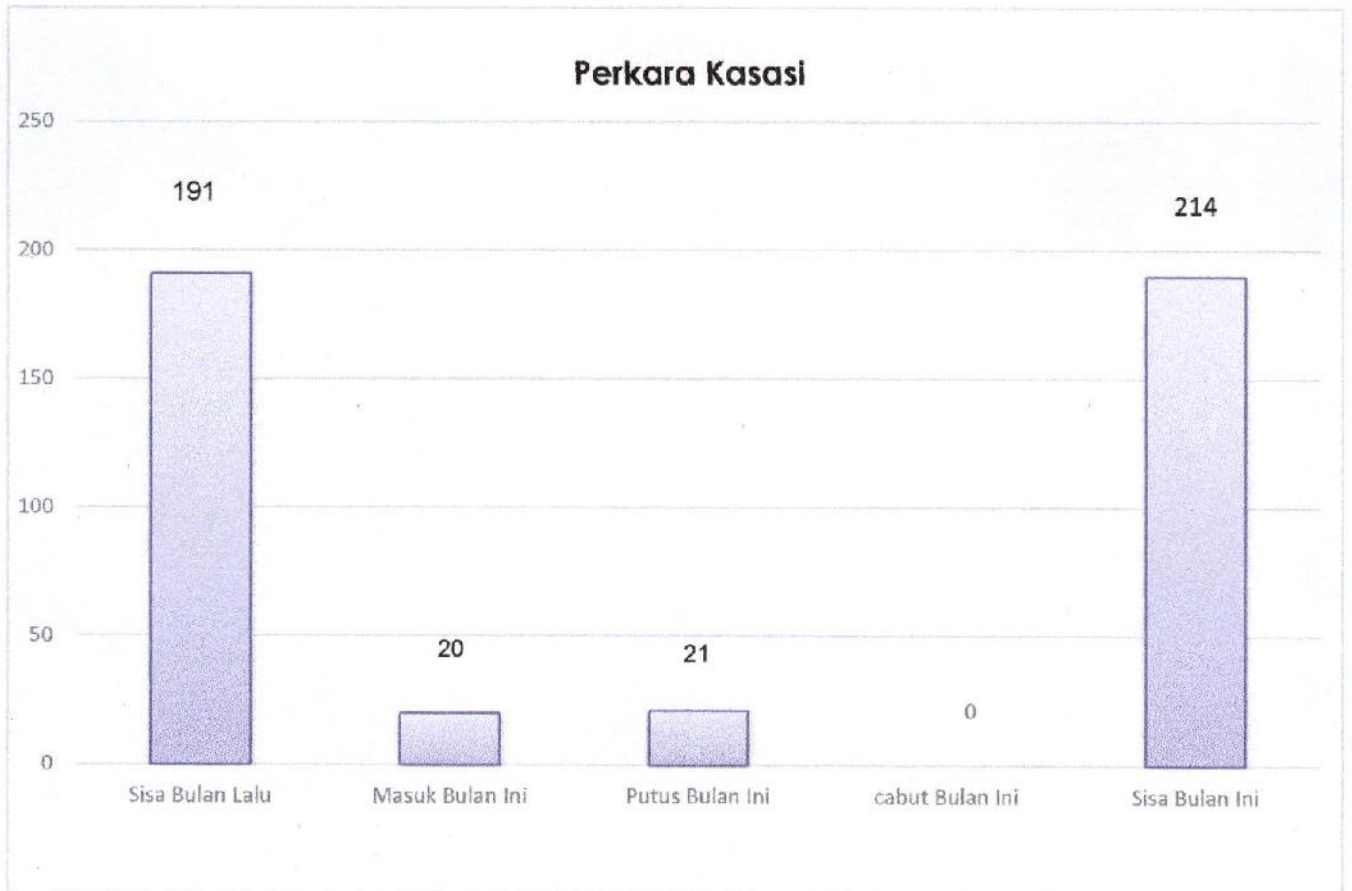


# LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

## Perkara Banding



# LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA



# LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

## 2. Kepaniteraan Muda Hukum

### - Laporan Jenis Perkara Bulan Oktober 2025

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
Jl. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang  
Jakarta Timur 13950 Telp. (021) 22859672

LAPORAN JENIS PERKARA  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
BULAN OKTOBER TAHUN 2025

FORMULIR LI-T2

NO	Jenis Perkara	Sisa Bulan Lalu	Perkara		Pengugat		Terpugat		Perlawanan		Putusan					Pembantuan			Tema Berkas		Keterangan						
			Musik	Orde	Jumlah	Perorangan	Badan Hukum	Perorangan	Badan Hukum	Orde	Orde	Orde	Orde	Orde	Orde	Orde	Orde	Orde	Orde	Orde		Orde	Orde				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
<b>A</b>	<b>GUGATAN</b>																										
1	Pertanahan	15	6	1	20	4	2	3	3	2	-	-	-	2	-	1	1	6	14	3	1	1	-	3	4	-	-
2	Kepegawaian	8	3	-	11	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	6	6	4	2	2	-	-	-	-
3	Pemilihan	13	4	-	17	1	6	6	1	-	-	-	-	1	1	3	-	5	12	2	1	1	-	4	3	-	-
4	Lingkungan Hidup	3	-	-	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Badan Hukum Parpol	21	7	1	27	4	4	8	-	1	-	-	-	1	-	1	2	5	22	3	5	-	-	15	1	-	-
7	Kejaca Desa dan Perangkat Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kejaca Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Proses Pemilihan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Pengantian Antar Waktu	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Ketertanggungjawaban	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Sengketa Informasi Publik/KIP	7	-	-	7	3	2	4	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	6	-	1	-	-	-	-	2	-
13	Pengadaan Tanah	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Fikih Positif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Pemeliharaan Wewenang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	10	6	-	16	4	2	8	-	-	-	-	-	-	-	3	3	13	-	-	10	1	-	4	2	-	-
17	Merek	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-
18	Lain Lain	36	10	2	44	0	2	8	3	1	-	-	-	3	1	5	3	13	31	8	7	1	-	8	6	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>116</b>	<b>38</b>	<b>4</b>	<b>150</b>	<b>27</b>	<b>21</b>	<b>39</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>38</b>	<b>111</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>-</b>

MENGETAHUI



Jakarta, 31 OKTOBER 2025  
PANI LISA

DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H.  
NIP. 197310122000091003

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



### - Laporan Penanganan Pengaduan Bulan Oktober 2025

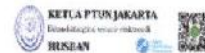
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
Jl. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang  
Jakarta Timur 13950 Telp. (021) 22859672

LAPORAN BULANAN PENANGANAN PENGADUAN  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
BULAN OKTOBER TAHUN 2025

L1-T5

NO	NAMA PENGADU	HAL YANG DIADUKAN	TANGGAL PENGADUAN	TINDAK LANJUT PENGADUAN	KETERANGAN
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Jakarta 31 OKTOBER 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



## LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

### C. KEGIATAN LAIN - LAIN

- Pada tanggal 1 Oktober 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melaksanakan Upacara dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Upacara di mulai pada pukul 08.00 WIB di halaman gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Upacara dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Bapak H. Husban, S.H., M.H., selaku pembina upacara. Seluruh jajaran pegawai mengikuti kegiatan dengan penuh khidmat, tertib, dan lancar. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2025 mengangkat tema "**Pancasila Perikat Bangsa Menuju Indonesia Raya.**"



## LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

- Jumat, 10 Oktober 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta melaksanakan **acara pengantar alih tugas Panitera Pengganti dan purna bakti Panitera**, sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan oleh para pegawai selama bertugas di PTUN Jakarta.



## LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

- Pada Hari Selasa, 14 Oktober 2025. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menerima kedatangan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Bapak **H. Iswan Herwin, S.H., M.H.** beserta rombongan. Kegiatan ini dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan terhadap satuan kerja di bawah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai tingkat banding.



## LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

- Selasa, 28 Oktober 2025, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta melaksanakan **Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97** yang bertempat di halaman kantor PTUN Jakarta. Upacara berlangsung dengan khidmat dan penuh semangat kebangsaan, diikuti oleh seluruh jajaran aparatur PTUN Jakarta.



## BAB III

### TELAAHAN

#### Kondisi Rumah Dinas

Bahwa Rumah Negara/Dinas dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang saat ini berjumlah 6 unit, dengan kondisi 2 unit dalam keadaan rusak ringan dan 4 unit kondisinya dalam keadaan tidak layak huni/memprihatinkan seperti banyaknya atap rumah yang bocor, kusen yang lapuk, lantai keramik yang retak, tembok yang rusak. Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memerlukan anggaran untuk renovasi rumah dinas.

#### Kondisi Kendaraan Dinas

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki 12 Kendaraan Dinas

1. Kendaraan Roda 4 berjumlah 4 Unit, dalam kondisi rusak ringan oleh karena itu PTUN Jakarta membutuhkan tambahan anggaran.
2. Kendaraan Roda 2 berjumlah 7 Unit, dalam kondisi rusak berat sebanyak 2 (dua) unit dan 5 (lima) unit dalam keadaan rusak ringan. Oleh karena itu PTUN Jakarta memerlukan tambahan anggaran perawatan dan terhadap 2 unit kendaraan rusak tersebut kami akan mengusulkan penghapusan dari barang milik negara sehingga PTUN Jakarta masih membutuhkan 2 unit kendaraan roda 2 (dua).
3. Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta saat ini mempunyai pegawai secara keseluruhan berjumlah 76 ASN, dan 11 orang PPPK sebagian pegawai tersebut terdapat adanya jabatan rangkap, khususnya ada 3 (tiga) Panitera Pengganti dan 4 (empat) JSP yang merangkap sebagai staf pada Kepaniteraan.

Berkaitan dengan hal tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masih memerlukan penambahan pegawai yang diperuntukan sebagai staf di Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

# LAPORAN BULANAN PTUN JAKARTA

## BAB IV

### KESIMPULAN, USUL DAN SARAN

#### 1. KESIMPULAN

Pelaksanaan jalannya organisasi dan tata kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Bulan Oktober 2025 berjalan dengan lancar.

#### 2. USUL DAN SARAN


Dalam rangka pelaksanaan tugas di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kami mengusulkan peningkatan Sumber Daya Manusia :

- Mohon agar diberikan Anggaran Biaya Tambahan untuk Perawatan Gedung dan halaman, dan PC All in One.
- Mohon Penambahan Pegawai untuk ditempatkan di bidang Kesekretariatan dan di Kepaniteraan yang saat ini banyak di isi dari Pejabat Fungsional ( Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ).





Jakarta, 05 November 2025

Mengetahui  
Wakil Ketua,  
  
Yawan, S.H., M.H.  
NIP 197403071993031004

Pih. Sekretaris,







  
Tias Descariasty, S.H.  
NIP. 198412092006042002

## Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta







No	Rumah Dinas 1 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
1		<ul style="list-style-type: none"><li>- Rumah dinas Ketua PTUN Jakarta,</li><li>- Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur,</li><li>- Kondisi rusak berat yang terdiri dari ;<ul style="list-style-type: none"><li>• Bangunan atau sebagian besar komponen struktur rusak, serta langit-langit akan runtuh.</li><li>• Membahayakan / beresiko difungsikan,</li><li>• Perbaiki dengan rekonstruksi.</li></ul></li></ul>
		
		
		





## Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

No	Rumah Dinas 2 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
2		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rumah dinas Hakim PTUN Jakarta,</li> <li>- Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur,</li> <li>- Kondisi Rusak Ringan yang terdiri dari ;                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atap atap /plafon jebol,</li> <li>• Kusen yang sudah termakan rayap,</li> <li>• Dinding / tembok yang sudah mulai kusam dan rusak</li> <li>• Kaca depan rumah pecah</li> <li>• Pagar roboh</li> </ul> </li> </ul>
		
		
		
		
		





### Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

No	Rumah Dinas 3 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
3		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rumah dinas Hakim PTUN Jakarta,</li> <li>- Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur,</li> <li>- Kondisi rusak berat yang terdiri dari ;                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bangunan atau sebagian besar komponen struktur rusak,</li> <li>• Komponen penunjang lainnya rusak total</li> <li>• Membahayakan / beresiko difungsikan,</li> <li>• Perbaikan dengan rekonstruksi.</li> </ul> </li> </ul>
		
		
		
		
		

### Rumah Dinas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

No	Rumah Dinas 4 di Jl. Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur	Keterangan
4		<ul style="list-style-type: none"><li>- Rumah dinas Wakil Ketua PTUN Jakarta,</li><li>- Alamat Jl.Pendidikan Pulogebang Jakarta Timur,</li><li>- Kondisi rusak berat yang terdiri dari ;<ul style="list-style-type: none"><li>• Bangunan atau sebagian besar komponen struktur rusak,</li><li>• Komponen penunjang lainnya rusak seperti atap dan pagar</li><li>• Membahayakan / beresiko difungsikan,</li><li>• Perbaikan dengan rekonstruksi.</li></ul></li></ul>
		

### KENDARAAN DINAS RODA 2

No	Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
1	Honda Tiger CW 200 cc	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Honda Tiger CW 200 cc</li> <li>- Plat Nomor B 6017 TQA</li> <li>- Merk Honda</li> <li>- Thn 2007</li> <li>- Kondisi Rusak Berat</li> </ul>	2	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Honda Supra X 125 D</li> <li>- Plat Nomor B 6016 TQA</li> <li>- Merk Honda</li> <li>- Thn 2007</li> <li>- Kondisi Rusak Ringan</li> </ul>
					
No	Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
3	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Honda Supra X 125 D</li> <li>- Plat Nomor B 6018 TQA</li> <li>- Merk Honda</li> <li>- Thn 2007</li> <li>- Kondisi Rusak Ringan</li> </ul>	4	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Honda Supra X 125 D</li> <li>- Plat Nomor B 6391 TQA</li> <li>- Merk Honda</li> <li>- Thn 2008</li> <li>- Kondisi Rusak Ringan</li> </ul>
					

No	Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
5	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Honda Supra X 125 D</li> <li>- Plat Nomor B 6392 TQA</li> <li>- Merk Honda</li> <li>- Thn 2008</li> <li>- Kondisi Rusak Ringan</li> </ul>	6	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Honda Supra X 125 D</li> <li>- Plat Nomor B 6393 TQA</li> <li>- Merk Honda</li> <li>- Thn 2008</li> <li>- Kondisi Rusak Berat</li> </ul>
					
No	Nama Barang	Keterangan	No	Nama Barang	Keterangan
7	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Honda Supra X 125 D</li> <li>- Plat Nomor B 6394 TQA</li> <li>- Merk Honda</li> <li>- Thn 2008</li> <li>- Kondisi Rusak Ringan</li> </ul>	8	Honda Supra X 125 D	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Honda Supra X 125 D</li> <li>- Plat Nomor B 6395 TQA</li> <li>- Merk Honda</li> <li>- Thn 2008</li> <li>- Kondisi Rusak Ringan</li> </ul>
					